

LKj-IP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

2024

(Pedoman Penyusunan Permenpan RB No 53 Tahun 2014)



Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2025

LAPORAN KINERJA

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

Judul Buku : Laporan Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (LKj-IP 2024)
Tahun Penerbitan : 2025

Penanggung Jawab/Penasehat/Pembina
Drs. Agus Sadikin (Kepala Dinas)

Pengarah :
Rika Hartati, S. Pt (Sekretaris Dinas)

Penyusun :
Aswati Oktriana, AZ, S. Pt
Mhd. Amin, S. IP

Pengumpul Data :
Aswati Oktriana, AZ, S. Pt
Mhd. Amin, S. IP
Supiono, S. Pdi

Desain :
Aswati Oktriana, AZ, S. Pt

Penerbit :
Subag Perencanaan Disbunnak

Thanks to :
Kepala Bidang Budidaya Agribisnis Peternakan (Drh. Ashari Adam s, M. Si)
Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet (Edo Wirandi, ST)
Kepala Bidang Perkebunan (Hardani, S. Kom)
Kepala Bidang Perlindungan (Anwar Sadat, Sp, M.SE)
Kepala UPTD BPTB (Amran Marzuki, S. Pt)
Kepala UPTD Puskesmas Muara Sabak Barat (Drh. Abdul Roni)
Kepala UPTD BPT (Dani Maretta S, A. Md)
Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Bagian Ortala Pemkab Tanjung Jabung Timur
BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur



KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan rahmat-Nya jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat melaksanakan tugas selama Tahun 2024 secara optimal sesuai kemampuan yang dimiliki meskipun disana-sini masih terdapat kekurangan serta banyak menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan.

Kegiatan yang disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 diperoleh berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari pelaksana Lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelaksanaan tugas selama Tahun 2024 telah diupayakan semaksimal mungkin sesuai kemampuan yang Kami miliki namun demikian tentunya tetap masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan ini merupakan bahan Kami kedepan agar lebih baik lagi.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diucapkan terima kasih.

Makassar, 12 Maret 2025

Kepala Dinas



AGUS SADIKIN
Kepala Dinas Muda IVc
NIP. 196605061985121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 . Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3 Landasan Hukum	10
1.4 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	
BAB II Perencanaan Kinerja	27
2.1 Rencana Strategis	27
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	27
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	28
2.4 Pagu Anggaran	28
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	
3.2 Realisasi Anggaran	
BAB IV Penutup	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya good governance (kepemerintahan yang baik) merupakan syarat bagi setiap

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dilaksanakan oleh OPD Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 33).

Tujuan dari penyusunan laporan pertanggung jawaban Dinas Perkebunan dan Peternakan yaitu :

1. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024.
2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

1.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan OPD

1. Visi dan Misi

Visi adalah pandangan yang jauh ke depan, merupakan arah kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa agar lebih berkarya untuk tetap eksis, inovatif serta produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Perwujudan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercermin dari Visi dan Misi Pembangunan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan mendukung Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

**"MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR (MERAKYAT)"**

Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan Misi yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil, tercapai dengan optimal serta sesuai dengan Visi. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh aparatur Dinas Perkebunan dan Peternakan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh dimasa yang akan mendatang.

Visi ini harus sejalan dengan Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Dinas Perkebunan dan Peternakan mendukung Misi Pertama yakni :
"Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan".

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan. Tujuan akan menjadi arah perjalanan Dinas Perkebunan dan Peternakan dan perbaikan-perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan. Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, Dinas Perkebunan dan Peternakan telah menetapkan Tujuan Strategis sebagai berikut:

**“MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DAN
PERIKANAN”**

Terkait dengan tujuan tersebut, Dinas Perkebunan dan Peternakan menetapkan **Sasaran Strategisnya** adalah:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

Dengan Indikator Sasaran :

Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan dengan Target Tahun 2024 yaitu 0,81%

2. Peningkatan Populasi Hewan Ternak

Dengan Indikator Sasaran :

Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak dengan Target Tahun 2024 yaitu 1,57%

3. Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan dengan Target Tahun 2024 yaitu 4%

4. Peningkatan Hasil Penjualan Hewan

Dengan Indikator Sasaran :

Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan dengan Target Tahun 2024 yaitu 4%

2. Peningkatan Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Dengan Indikator Sasaran:

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) (Skor) dengan Target Tahun 2024 yaitu 88,3

2. Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan Target Tahun 2024 yaitu B

3. Laporan Keuangan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dengan Target Tahun 2024 yaitu Sesuai

3. Program dan Kegiatan OPD

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Dari Pengertian tersebut diketahui bahwa program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan strategi yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan ditetapkan 6 (enam) Program, 16 (Enam belas) kegiatan dan 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

	Keuangan SKPD
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.4.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
1.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
1.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
2.1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

2.1.1	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
2.2	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.2.1	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2.3	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.3.1	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
2.4	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
2.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Benih, Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3.1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
3.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana Sarana Kawasan Pertanian
3.2	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
3.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
4.1	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam daerah Kabupaten/Kota
4.1.1	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4.2	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
4.2.1	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
5.1	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
5.1.1	Sub Kegiatan Pengendalian Organisasi Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
5.1.2	Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
6.1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
6.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

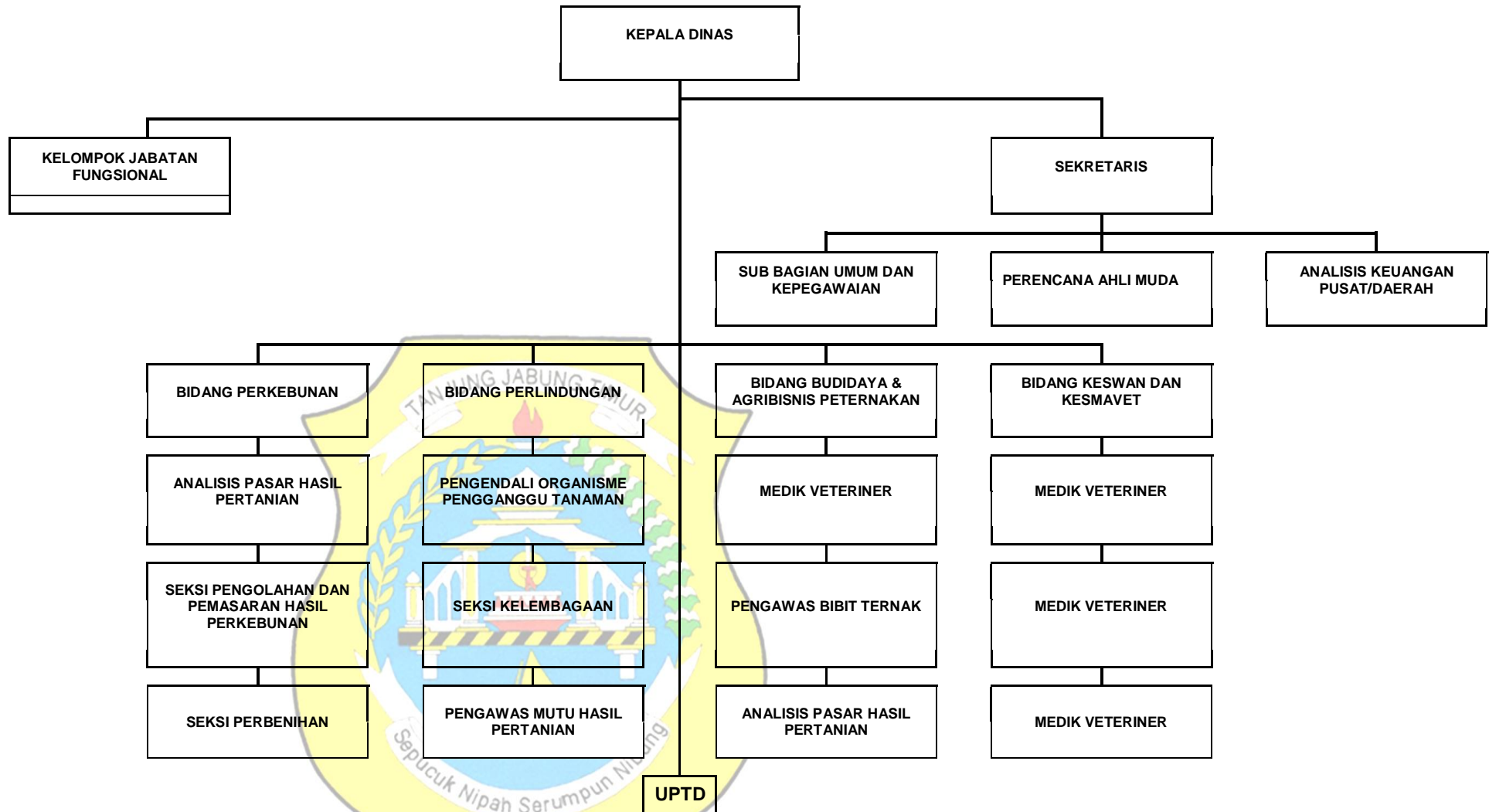
1.3. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengarahkan, menetapkan arah kebijaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna memudahkan aparaturnya Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan tugasnya, maka uraian tugas pokok dan fungsi dijabarkan dalam beberapa bagian, yakni tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana dalam gambar 1.1 Struktur Organisasi di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR



Gambar 1.1 Struktur Organisasi



2. Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Berdasarkan gambar struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di atas adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas;

II. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Perencana Ahli Muda;

3. Analisis Keuangan Pusat/Daerah;

III. Bidang Perkebunan, terdiri atas:

1. Analisis Pasar Hasil Pertanian;

2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

3. Seksi Perbenihan;

IV. Bidang Perlindungan, terdiri atas:

1. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman;

2. Pengawas Mutu Hasil Pertanian

3. Seksi Kelembagaan

V. Bidang Budidaya dan Agribisnis Peternakan, terdiri atas:

1. Medik Veteriner;

2. Pengawas Bibit Ternak;

3. Analisis Pasar Hasil Pertanian;

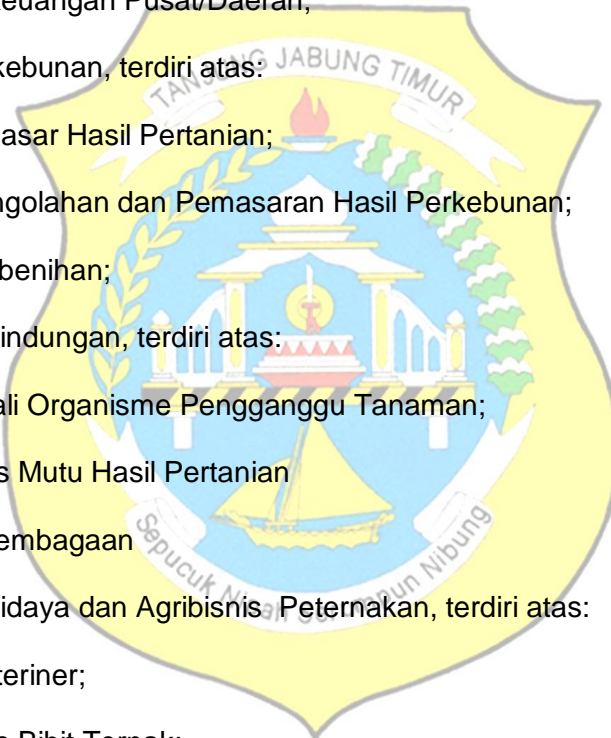
VI. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, terdiri atas:

1. Medik Veteriner;

2. Medik Veteriner;

3. Medik Veteriner;

VII. UPTD.



❖ **Sekretariat**

- Sekretariat mempunyai tugas :

Pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

- Sekretariat melaksanakan fungsi sebagaimana berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pengelolaan urusan umum.

I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi:

- a. penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol.
- h. penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;
- i. penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas; dan

k. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

II. Perencana Ahli Muda

Mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, yang meliputi:

- a. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

III. Analisis Keuangan Pusat/Daerah

Mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan, yang meliputi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan; dan Aset
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan dan Aset

❖ Bidang Perkebunan

- Bidang Perkebunan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan, usaha dan sarana usaha perkebunan.

- Bidang Perkebunan melaksanakan fungsi sebagaimana berikut :

- a. Pelaksanaan bimbingan teknis penyuluhan budidaya, penerapan dan pengujian teknologi peningkatan mutu dan produksi perkebunan;
- b. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan pertimbangan teknis

(rekomtek) pemberian izin usaha perkebunan;

- c. pelaksanaan pengembangan pengelolaan lahan dan air serta jalan produksi kawasan perkebunan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyediaan kebutuhan pupuk untuk peningkatan produksi perkebunan serta monitoring dan pengawasannya.
- e. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan pembinaan terhadap usaha perkebunan, usaha agribisnis perkebunan dan industri perkebunan;
- g. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan;
- h. Pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;

I. Seksi Produksi Perkebunan

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan bimbingan teknis penyuluhan budidaya, penerapan dan pengujian teknologi peningkatan mutu dan produksi perkebunan, pemberian rekomendasi dan pertimbangan teknis (rekomtek) pemberian izin usaha perkebunan, pengembangan pengelolaan lahan dan air serta jalan produksi kawasan perkebunan serta koordinasi penyediaan kebutuhan pupuk untuk peningkatan produksi perkebunan serta monitoring dan pengawasannya.

II. Analisis Pasar Hasil Pertanian

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta pengawasan, monitoring dan pembinaan terhadap usaha perkebunan, usaha agribisnis perkebunan dan industri

perkebunan.

III. Seksi Perbenihan

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di tanaman perkebunan serta pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan.

❖ Bidang Perlindungan

▪ Bidang Perlindungan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan perlindungan lahan dan tanaman perkebunan serta pembinaan kelembagaan petani perkebunan dan peternak.

▪ Bidang Perlindungan melaksanakan fungsi sebagaimana berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi perlindungan keberadaan kawasan hidrologis gambut;
- b. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan perkebunan;
- c. pelaksanaan koordinasi penanganan dan pengendalian hama penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pestisida sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan fasilitasi pembentukan, pendataan, pembinaan dan penguatan kelembagaan petani perkebunan dan peternak;
- f. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi lahan perkebunan rakyat;
- g. pelaksanaan inventarisasi dan rehabilitasi lahan dan perkebunan yang terkena kebakaran;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi Teknis Analisa mengenai

Pengendalian Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap perizinan perkebunan;

i. pelaksanaan koordinasi penegakan hukum di bidang perkebunan.

I. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan koordinasi perlindungan keberadaan kawasan hidrologis gambut, pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan perkebunan, koordinasi penanganan dan pengendalian hama penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan serta pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pestisida sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. Seksi Kelembagaan

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi pembentukan, pendataan, pembinaan dan penguatan kelembagaan petani perkebunan dan peternak serta fasilitasi sertifikasi lahan perkebunan rakyat.

III. Pengawas Mutu Hasil Pertanian

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan inventarisasi dan rehabilitasi lahan dan perkebunan yang terkena kebakaran, pemberian rekomendasi Teknis Analisa mengenai Pengendalian Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap perizinan perkebunan serta koordinasi penegakan hukum di bidang perkebunan.

❖ **Bidang Budidaya dan Agribisnis Peternakan**

- Bidang Budidaya Ternak mempunyai tugas

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi ternak serta pengawasan terhadap mutu, peredaran dan pengendalian benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.

- Bidang Budidaya Ternak melaksanakan fungsi sebagaimana berikut:
 - a. pelaksanaan penetapan dan pengembangan kawasan peternakan;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penetapan standar mutu bibit ternak;
 - c. pelaksanaan pengawasan peredaran lalu lintas bibit ternak, ternak dan hewan lainnya;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan sosialisasi pola pemeliharaan, penyebaran dan pengembangan ternak dan hewan lainnya;
 - e. pelaksanaan pendayagunaan dan fasilitasi penguatan modal investasi/dana bergulir usaha di bidang peternakan;
 - f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran ternak dan hasil ternak;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, perbanyakan dan penyaluran pakan dan benih hijauan pakan;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi serta kerjasama pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan;

I. Pengawas Bibit Ternak

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan dan pengembangan kawasan peternakan serta pembinaan, pengawasan dan penetapan standar mutu bibit ternak.

II. Medik Veteriner

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta

pelaporan pelaksanaan pengawasan peredaran lalu lintas bibit ternak, ternak dan hewan lainnya, penyusunan dan sosialisasi pola pemeliharaan, penyebaran dan pengembangan ternak dan hewan lainnya, pendayagunaan dan fasilitasi penguatan modal investasi/dana bergulir usaha di bidang peternakan serta pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran ternak dan hasil ternak.

III. Analisis Pasar Hasil Pertanian

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, perbanyakan dan penyaluran pakan dan benih hijauan pakan serta pembinaan dan pengawasan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi serta kerjasama pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.

❖ Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perlindungan dan pelayanan umum kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

- Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan fungsi sebagaimana berikut:
 - a. pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pelayanan umum kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan;

I. Medik Veteriner

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis,

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan yang meliputi:

- a. penyiapan bahan surveillans penyakit melalui pengambilan spesimen/sampel serta pemberian vaksinasi hewan;
- b. penyiapan bahan pemantauan dan pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan ternak dan produk hewan;
- c. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- d. penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular.

II. Medik Veteriner

mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perlindungan dan pelayanan umum kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi:

- a. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- b. penyiapan bahan sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil dan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- c. penyiapan bahan analisis resiko dan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- d. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- e. penyiapan bahan bimbingan teknis penyelenggaraan rumah potong/tempat pemotongan hewan dan pemotongan hewan qurban;

III. Medik Veteriner

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta

pelaporan pelaksanaan pengawasan obat hewandan pelayanan kesehatan hewan yang meliputi:

- a. penyiapan bahan melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- b. penyiapan bahan melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- c. penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor serta penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan.

3. Jumlah Pegawai

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada Tahun 2024, jumlah pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan keseluruhan adalah sebanyak 107 orang yang terdiri dari PNS 33 Orang dan PHTT 74 Orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	40	35
2	Paramedis Keswan	16	14
3	Pegawai Honorer Tidak Tetap (PHTT)	58	51
Jumlah		114	100

Berdasarkan Tabel 1.1. Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 114 Orang yang terdiri dari 1) PNS sebanyak 40 Orang (35%) termasuk Dokter Hewan 7 Orang (5 Orang bertugas di Dinas dan 2 Orang bertugas di Lapangan), 2) Paramedis Keswan sebanyak 16 Orang (14%) bertugas di 11 Puskesmas 11 Kecamatan, 3) PHTT sebanyak 58 Orang (51%) bertugas di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan (26 Orang), Dokter Hewan di Kecamatan Nipah Panjang 1 Orang, Petugas Penjaga

Kantor Pasar Ternak 1 Orang, Di Kandang Taman Teknologi Pertanian (TTP) 7 Orang, UPTD Balai Pembibitan Ternak (BPT) 10 Orang, 6 Orang Pemadam Kebakaran Kebun, Petugas Pemeriksa Kebuntingan 1 Orang, Petugas Tenaga Kebersihan Kantor 1 Orang, Petugas Kebersihan Pasar Ternak 2 Orang dan Petugas Keamanan 1 Orang.

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	10	25
2	Golongan III	25	63
3	Golongan II	5	13
4	Golongan I	0	0,0
	Jumlah	40	100

Berdasarkan Tabel 1.2. pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0%, Golongan II sebanyak 6 Orang (19%) , pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan banyak ditempati oleh golongan III, dilain sisi Dinas Perkebunan dan Peternakan memerlukan tambahan tenaga Dokter Hewan di Lapangan dan Staf di Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Strata-2 (S2)	9	23
2	Strata-1 (S1)	20	50
3	Sarjana Muda/D3	4	10
4	SMA	7	18
	Jumlah	40	100

Berdasarkan Tabel 1.3. Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Pendidikan terdiri atas Strata-2 (S2) sebanyak 9 Orang (23%), Strata-1 (S1) sebanyak 20 Orang (50%), Sarjana Muda/D3 sebanyak 4 Orang (10%), dan SMA sebanyak 7 Orang (18%). Berdasarkan Data

komposisi tersebut, dapat di sampaikan bahwa Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Sebagian besar ditempati oleh Sarjana yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada memiliki Kualifikasi Pendidikan yang baik dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pembangunan Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pengisian Formasi Jabatan Struktural di Dinas Perkebunan dan Peternakan terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 27 Jabatan termasuk UPTD dan terisi 23 Jabatan.

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Jabatan dan Staf

No	Jabatan	Jumlah	%
1	Eselon II	1	3
2	Eselon III	5	13
3	Eselon IV	4	10
4	Fungsional Tertentu	15	38
5	Fungsional Umum	15	38
Jumlah		40	100

Berdasarkan Tabel 1.4. Pegawai PNS Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Jabatan dan Staf terdiri atas Eselon II sebanyak 1 Orang Kadis, Eselon III sebanyak 5 Orang (Sekretaris, Kabid 4 Orang), Eselon IV Struktural sebanyak 4 Orang (Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kepala UPD Puskeswan, Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan dan Kasubag TU UPT Balai Pembibitan Ternak. Fungsional Tertentu berjumlah 15 Orang dan Fungsional Umum berjumlah 15 Orang. Melihat komposisi tersebut Jabatan Eselon terisi 21 jabatan dari 24 jabatan yang disediakan, Jabatan yang belum terisi

yaitu : 1 Kepala UPTD BPT 3) Kasubbag TU UPTD Puskesmas 4) Kasubbag TU UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan

Sarana Kerja yang ada di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam Tabel 1.5. berikut.

Tabel 1.5. Sarana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Satker Puskesmas di 11 Kecamatan	11	Unit
2	Pasar Ternak di Kec. Geragai	1	Unit
3	UPTD Balai Pembibitan Ternak (BPT) di Kec. Mendahara Ulu	1	Unit
4	UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan di Parit Culum Kec. Muara Sabak Barat dekat Pondok Modern Darussalam Gontor 12	1	Unit
5	Taman Teknologi Pertanian (TTP) Kec. Geragai	1	Unit

4. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Anggaran program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 yang digunakan untuk Belanja Operasi dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 13.333.166.785 telah terealisasi sebesar Rp. 10.638.677.552 atau sebesar 79,79% sedangkan Belanja Modal dengan pagu anggaran Rp. 374.350.000 telah terealisasi sebesar Rp. 374.350.000 atau sebesar 97,47%. Total Belanja Operasi dan Belanja Modal adalah Rp. 13.707.516.785 dengan realisasi sebesar Rp. 11.003.572.552 atau sebesar 80,27% sampai dengan Bulan Desember 2024.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kewenangan menyelenggarakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan good governance, mengelola sumber daya alam kebun dan ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengedepankan sistem kinerja yang professional dan akuntabel agar kebun dan ternak dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintah, karena berkaitan dengan upaya untuk mensejahterakan rakyat dan pembangunan infrastruktur. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi karenanya keluaran (output) dari perencanaan adalah anggaran.

Secara umum pengelolaan pendapatan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan penerimaan daerah tahun bersangkutan yang terukur secara rasional untuk dicapai dari setiap sumber pendapatan yang ada.

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Dengan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, adapun Target dan Realisasi Pendapatan berdasarkan OPD Pemungut Tahun 2024 Target sebesar Rp. 109.368.000,- dan terealisasi sebesar Rp.51.257.500 atau sebesar 46,87%.

Adapun Retribusi Daerah Tersebut berupa;

- 1) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan dengan target Rp. 9.368.000,- dengan realisasi Rp. 1.120.000,- atau sebesar (11,96%)
- 2) Hasil Penjualan Hewan dengan target Rp. 100.000.000,- terealisasi Rp. 50.137.500,- dalam bentuk persentase (50,14%).

Selanjutnya Target Pendapatan Daerah Pada Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemungut dengan rincian sebagaimana table dibawah ini.

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Pendapatan berdasarkan OPD Pemungut Tahun 2024

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	109.368.000	51.257.500	46,87
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.368.000	1.120.000	11,96
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000	50.137.000	50,14
	JUMLAH	109.368.000	51.257.000	46,87

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester I s.d Desember 2024 Dinas Perkebunan dan Peternakan

2. Permasalahan dan Solusi

Hambatan Pendapatan Daerah, 1) Pendapatan Retribusi Daerah, untuk sementara tidak dilaksanakan Penyediaan tempat Pelelangan Pasar Ternak terkait Wabah PMK sesuai Surat Edaran Menteri Pertanian RI Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak sehingga dilakukan penutupan sementara pasar hewan diwilayah wabah PMK. 2) Lain-lain PAD yang Sah. Dalam Proses Pengajuan Pelelangan Ternak.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Pengelolaan Belanja Daerah memiliki ciri hemat, tepat guna, dan tepat sasaran, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah menyangkut kewajiban daerah dalam membayar kebutuhan belanja yang telah direncanakan program dan kegiatan.

mengelola keuangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengelolaan belanja daerah menganut kebijakan pengalokasian dana dengan susunan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan Pembelian Barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, subsidi, hibah dan bantuan social.

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, asset tak berwujud.

2. Target dan Realisasi Belanja

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perkebunan dan Peternakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 13.707.516.785 Alokasi tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 13.333.166.785 dan realisasi belanja operasi sebesar Rp. 10.638.677.552 atau (79,79%) dan belanja modal sebesar Rp. 374.350.000 Realisasi Belanja modal sebesar Rp. 364.895.000,- atau sebesar 97,48%,. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%
1	Belanja	13.707.516.785	11.003.572.552	80,27
1.1	Belanja Operasi	13.333.166.785	10.638.677.552	79,79
1.2	Belanja Modal	374.350.000	364.895.000	97,48

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester I s.d Desember 2024 Dinas Perkebunan dan Peternakan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dicapai selama tahun 2024 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2024 kinerja sebagai tolak ukur kinerja.

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggung jawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Bidang Perkebunan dan Peternakan termasuk penyelenggaraan urusan pilihan.

Urusan pilihan Dinas Perkebunan dan Peternakan pada Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan melalui Enam program prioritas yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (6) Program Penyuluhan Pertanian

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Untuk mengukur dan menilai Akuntabilitas diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur pencapaian hasil, dimana capaian kinerja dinilai, dievaluasi tingkat keberhasilannya sehingga dapat dijadikan alat pengambilan keputusan strategi tahun berikutnya. Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan dengan bidang urusan Pertanian Pada Tahun 2024 Dinas Perkebunan dan Peternakan melaksanakan 6 (Enam) Program 16 (Enam Belas) kegiatan dan 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1.

Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan. Tahun Anggaran 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.785.684.457	6.734.570.383	51.114.074	99,25
	DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1.1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	81.859.400	81.602.200	257.200	99,69
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.799.400	4.799.400	0	100
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.072.600	30.057.600	15.000	99,95
1.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.987.400	46.745.200	242.200	99,48
1.2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.471.472.467	5.455.084.988	16.387.479	99,70
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.026.832.467	4.019.044.988	7.787.479	99,81

ASN					
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.444.640.000	1.436.040.000	8.600.000	99,40
1.3	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	98.600.000	98.600.000	0	100
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	68.600.000	68.600.000	0	100
1.3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	30.000.000	0	100
1.4	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	307.719.738	305.098.313	2.621.425	99,15
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.880.000	42.839.000	41.000	99,90
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.292.470	72.755.800	2.536.670	96,63
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.975.068	30.933.300	41.768	99,87
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	0	100
1.4.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.190.000	5.190.000	0	100
1.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.382.200	148.380.213	1.987	100
1.5	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	308.812.852	298.710.000	10.102.852	96,73
1.5.1	Sub Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	35.000.000	28.260.000	6.740.000	80,74
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	273.812.852	270.450.000	3.362.852	98,77
1.6	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	89.170.000	67.448.382	21.721.618	75,64
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.570.000	4.570.000	0	100
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	84.600.000	62.878.382	21.721.618	74,32
1.7	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	428.050.000	428.026.500	23.500	99,99
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	405.910.000	405.886.500	23.500	99,99
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.140.000	22.140.000	0	100
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.287.800.950	1.256.216.862	31.584.088	97,55
2.1	KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	220.463.450	214.148.450	6.315.000	97,14

2.1.1	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	220.463.450	214.148.450	6.315.000	97,14
2.2	KEGIATAN PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	534.425.100	512.573.350	21.851.750	95,91
2.2.1	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	534.425.100	512.573.350	21.851.750	95,91
2.3	KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	266.543.400	264.545.250	1.998.150	99,25
2.3.1	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	266.543.400	264.545.250	1.998.150	99,25
2.4	KEGIATAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	266.369.000	264.949.812	1.419.188	99,47
2.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Benih, Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	266.369.000	264.949.812	1.419.188	99,47
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.711.870.078	1.161.391.067	1.550.479.011	42,83
3.1	KEGIATAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.453.034.228	916.790.067	1.536.244.161	37,37
3.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan	2.453.034.228	916.790.067	1.536.244.161	37,37
3.2	KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	258.835.850	244.601.000	14.234.850	94,50
3.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	258.835.850	244.601.000	14.234.850	94,50
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.449.531.800	1.426.153.624	1.023.378.176	58,22
4.1	KEGIATAN PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.316.745.500	1.295.537.650	1.021.207.850	55,92
4.1.1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2.316.745.500	1.295.537.650	1.021.207.850	55,92
4.2	KEGIATAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	132.786.300	130.615.974	2.170.326	98,37
4.2.1	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	132.786.300	130.615.974	2.170.326	98,37
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	219.222.700	198.763.690	20.459.010	90,67

5.1	KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	219.222.700	198.763.690	20.459.010	90,67
5.1.1	Sub Kegiatan Pengendalian Organisasi Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	65.400.200	61.693.058	3.707.142	94,33
5.1.2	Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	153.822.500	137.070.632	16.751.868	89,11
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	253.406.800	226.476.926	26.929.874	89,37
6.1	KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	253.406.800	226.476.926	26.929.874	89,37
6.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	253.406.800	226.476.926	26.929.874	89,37
JUMLAH		13.707.516.785	11.003.572.552	2.703.944.233	80,27

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Desember 2024

B. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, setiap perangkat daerah dituntut untuk mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pembangunan sektor pertanian, memegang peranan strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah melalui program dan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tahun Anggaran 2024 menjadi momentum penting bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk meningkatkan kinerja belanja, mengingat berbagai tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, dan kebutuhan peningkatan produktivitas petani. Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Tahun 2024, terdapat berbagai capaian indikator kinerja utama (IKU) yang harus dianalisis lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan anggaran.

Analisis efektivitas bertujuan untuk menilai sejauh mana output dan outcome kegiatan telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Sementara itu, analisis efisiensi digunakan untuk mengukur perbandingan antara input (biaya atau sumber daya) yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui apakah alokasi anggaran yang telah

dikeluarkan selama tahun anggaran 2024 telah digunakan secara optimal dalam mendukung program prioritas,

Demikian, analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja ini sangat penting untuk memberikan evaluatif terhadap pelaksanaan program/kegiatan, menjadi masukan perencanaan.

JURNAL AKUNTANSI INDONESIA

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi belanja langsung}}{\text{Target belanja langsung}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan bahwa anggaran belanja dapat dikatakan efektif jika memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini:

Tabel 1: Kriteria Efektivitas

Prosentase	Keterangan
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

Sedangkan efisiensi dapat diukur dengan cara membandingkan antara realisasi belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%. Berikut adalah rumus untuk menentukan efisiensi dari suatu anggaran belanja:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan bahwa anggaran belanja dapat dikatakan efisien jika memenuhi kriteria-kriteria di Tabel 2.

Tabel 2: Kriteria Efisiensi

Prosentase	Keterangan
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menunjukkan fakta-fakta dari data yang diambil pada suatu objek yang diteliti. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang

Penghitungan Tingkat Efektifitas Penggunaan Anggaran 2024

Dari hasil perhitungan efektifitas penggunaan anggaran maka didapat perhitungan sebagaimana, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Pengukuran Tingkat Efetifitas Anggaran tahun 2024.

Program	Target Rp	Realisasi Rp	Silpa Rp	Efektifitas	Kategori Efektif
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6,785,684,457	6,734,570,383	51,114,074	99,25	Efektif
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,287,800,950	1,256,216,862	31,584,088	97,55	Efektif
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2,711,870,078	1,161,391,067	1,550,479,011	42,83	Tidak Efektif
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2,449,531,800	1,426,153,624	1,023,378,176	58,22	Tidak Efektif
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	219,222,700	198,763,690	20,459,010	90,67	Efektif
Penyuluh Pertanian	253,406,800	226,476,926	26,929,874	89,37	Cukup Efektif
Jumlah	13,707,516,785	11,003,572,552	2,703,944,233		
Capaian Keuangan				80,27	
Capaian Fisik				80,27	

Berdasarkan Tabel 2.1 dari enam program pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2024, terdapat dua program yang Tidak efektif di karenakan :

1. Kegiatan Sumber Daya DBH Sawit Tahun 2024

Kegiatan yang tidak terlaksana adalah Pembentukan TIM Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (PAD KSB)

2. Sertifikasi ISPO

Kendala tidak terlaksananya kegiatan :

- RAD KSB, Belum adanya regulasi tentang pembentukan atau penyusunan RAD KSB
- ISPO, Belum ada Lahan /Kebun Masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk diterbitkan sertifikasi ISPO

3. Kegiatan Keswan dan Kesmavet yang tidak terserap di Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2024, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2024 diberikan kepada 11 Puskesmas di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan masing-masing Puskesmas mendapatkan dana Dak Non Fisik tahun 2024 sebesar Rp. 190.575.000 per Puskesmas sesuai juknis DAK Non Fisik

Tahun 2024 tercantum dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2024 Dak Non Fisik Tahun 2024 ini tidak semua terserap di karenakan jumlah populasi ternak pada masing-masing kecamatan tidak sama. Seperti popuasi ternak ruminansia Besar berbada disetiap kecamatan, dan dalam pelaksanaan pelayanan keswan terdapat ketentuan dalam mencairkannya. Seperti contohnya dalam hewan sapi, untuk satu hari harus 10 ekor dalam pelayanan keswan untuk dapat di cairkan, sementara ada kecamatan yang tidak memenuhi di karenakan dengan kondisi wilayah susah di jangkau dan populasi hewannya sedikit.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program (Outcome) adalah Indeks Pelayanan Instansi (Poin) Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)

- 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)

- 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)

- 1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah (%)

- 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)

- 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi (Laporan)

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)

3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)

3.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah (%)

4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)

4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)

4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)

4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)

4.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)

4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)

5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)

6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)

7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)

7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)

8) Kegiatan Penataan Organisasi

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Penataan Organisasi (%)

8.1 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Indikator Program (Outcome) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian ada 2 Indikator Program (Outcome) antara lain :

- 1) Persentase Inseminasi Buatan (%)
- 2) Persentase Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT) (%)

Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (%)

1.1 Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan).

2) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)

3) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.1 Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia (Laporan)

4) Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Tersedianya Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ekor)

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Indikator Program (Outcome) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian ada 3 Indikator Program (Outcome) antara lain :

1) Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan (%)

2) Persentase Ketersediaan TAM (%)

3) Persentase Jalan Produksi

Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian (%)

1.2 Sub Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah 1) Jumlah Dokumen Masterplan (Dokumen)

2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian (%)

2.1 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)

d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Indikator Program (Outcome) adalah Ada 2 Indikator Program (Outcome) antara lain :

1) Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)

2) Persentase Sampel Pangan Asal Hewan /Hasil Pangan Asal Hewan(%)

Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan (%)

1.1 Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Wilayah atau Kawasan yang mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)

2. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)

2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)

e. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Indikator Program (Outcome) adalah Ada 2 Indikator Program (Outcome) antara lain :

- 1) Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman (%)
- 2) Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan (%)

Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (%)

1.1 Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Ha)

1.2 Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Ha)

f. Program Penyuluhan Pertanian

Indikator Program (Outcome) adalah Cakupan Bina Kelompok Tani (%)

Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan yang dibina

1.1 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan yang terdiri atas Capaian Kinerja, Capaian Program, Kegiatan dan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan					
1	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	0,81	0,42	51,85
2	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak	1,57	1,63	100
MISI 3 : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari					
3.	Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	4	0	0
4.	Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	4	3,32	83
MISI 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tataan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis					
5.	Peningkatan Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) (Score)	88,3	81,09	91,83
		Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	B	BB	100
		Laporan Keuangan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber : LKjIP Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2024

Tabel 3.3.

Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Target Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)	(7)	(8)	(9=8/7*100)	(10=7-8)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi (Poin)	88,3	81,09	91,83	6.785.684.457	6.734.570.383	99,25	51.114.074	Tidak ada masalah	Tidak Ada
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	81.859.400	81.602.200	99,69	257.200	Tidak ada masalah	Tidak Ada
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	100	4.799.400	4.799.400	100	0	Tidak ada masalah	Tidak Ada
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	4	4	100	30.072.600	30.057.600	99,95	15.000	Tidak ada masalah	Tidak Ada
	Ikhtisar Realisasi	Kinerja SKPD dan									

	Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)									
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	100	46.987.400	46.745.200	99,48	242.200	Tidak ada masalah	Tidak Ada
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah (%)	100	91,43	91,43	5.471.472.467	5.455.084.988	99,70	16.387.479	Tidak Ada	Tidak Ada
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	35	32	91,43	4.026.832.467	4.019.044.988	99,81	7.787.479	Tidak Ada	Tidak Ada
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	100	1.444.640.000	1.436.040.000	99,40	8.600.000	Tidak Ada	Tidak Ada
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100	60	60	98.600.000	98.600.000	100	0	Tidak Ada	Tidak Ada

		Perangkat Daerah									
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	1	1	100	68.600.000	68.600.000	100	0	Tidak Ada	Tidak Ada
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	6	60	30.000.000	30.000.000	100	0	Tidak Ada	Tidak Ada
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100	100	100	307.719.738	305.098.313	99,15	2.621.425	Tidak Ada	Tidak Ada
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1	1	100	42.880.000	42.839.000	99,90	41.000	Tidak Ada	Tidak Ada
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	1	1	100	75.292.470	72.755.800	96,63	2.536.670	Tidak Ada	Tidak Ada
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	1	1	100	30.975.068	30.933.300	99,87	41.768	Tidak Ada	Tidak Ada

	Pengadaan	disediakan (Paket)									
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	12	100	5.000.000	5.000.000	100,00	0	Tidak Ada	Tidak Ada
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	100	5.190.000	5.190.000	100,00	0	Tidak Ada	Tidak Ada
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	100	148.382.200	148.380.213	100,00	1.987	Tidak Ada	Tidak Ada
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	66,67	66,67	308.812.852	298.710.000	96,73	10.102.852	Tidak Ada	Tidak Ada
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diperlukan (Unit)	3	1	33,33	35.000.000	28.260.000	80,74	6.740.000	Tidak Ada	Tidak Ada
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30	30	100	273.812.852	270.450.000	98,77	3.362.852	Tidak Ada	Tidak Ada

		(Unit)									
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	89.170.000	67.448.382	75,64	21.721.618	Tidak Ada	Tidak Ada
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	100	4.570.000	4.570.000	100	0	Tidak Ada	Tidak Ada
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	1	100	84.600.000	62.878.382	74,32	21.721.618	Tidak Ada	Tidak Ada
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	428.050.000	428.026.500	99,99	23.500	Tidak Ada	Tidak Ada
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan di bayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	61	61	100	405.910.000	405.886.500	99,99	23.500	Tidak Ada	Tidak Ada

	Lapangan										
1.7. 2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	14	14	100	22.140.000	22.140.000	100	0	Tidak Ada	Tidak Ada
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Inseminasi Buatan (%)	73,39	87,04	100	1.287.800.950	1.256.216.862	97,55	31.584.088	Tidak Ada	Tidak Ada
		Persentase Produksi HPT (%)	66,67	62,50	93,75						
2.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian (%)	100	100	100	220.463.450	214.148.450	97,14	6.315.000	Tidak Ada	Tidak Ada
2.1. 1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	12	12	100	220.463.450	214.148.450	97,14	6.315.000	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	534.425.100	512.573.350	95,91	21.851.750	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2.	Pengawasan Mutu	Jumlah Pengawasan	1	1	100	534.425.100	512.573.350	95,91	21.851.750	Tidak	Tidak

1	Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan, Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil (Laporan)								Ada	Ada
2.3	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten /Kota (%)	100	100	100	266.543.400	264.545.250	99,25	1.998.150	Tidak Ada	Tidak Ada
2.3.1	Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan (Laporan)	1	1	100	266.543.400	264.545.250	99,25	1.998.150	Tidak Ada	Tidak Ada
2.4	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain (%)	100	100	100	266.369.000	264.949.812	99,47	1.419.188	Tidak Ada	Tidak Ada
2.4.1	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari	Jumlah Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/	500	500	100	266.369.000	264.949.812	99,47	1.419.188	Tidak Ada	Tidak Ada

	Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Kota Lain (Dosis)									
3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan (%)	66,67	2,19	3,28	2.711.870.078	1.161.391. 067	42,83	1.550.479.011		
		Persentase Ketersediaan TAM (%)	66,67	100	100						
		Persentase Jalan Produksi (%)	66,67	0	0						
3.1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100	100	100	2.453.034.228	916.790.06 7	37,37	1.536.244.161		
3.1. 1	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1	1	100	2.453.034.228	916.790.067	37,37	1.536.244.161	Kegiatan DBH Sawit masih menungg u Peraturan Kegiatan tersebut belum ada sehingga Kegiatan tsb belum	Untuk Keg. Penyusun an RAD Kelapa Sawit berkelanj utan Rancang an Matrik Kegiatan nya telah dibuat dan Untuk

										bisa dilaksanakan dan Kegiatan ISPO belum bisa dilaksanakan karena Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum memenuhi persyaratan.	Kegiatan ISPO saat ini sedang dilakukan peremajaan sawit rakyat sebagai Upaya agar Kabupaten Tanjung Jabung Timur bisa memenuhi persyaratan untuk melakukan sertifikasi ISPO
3.2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian (%)	100	100	100	258.835.850	244.601.000	94,50	14.234.850	Tidak Ada	Tidak Ada
3.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan	1	2	100	258.835.850	244.601.000	94,50	14.234.850	Tidak Ada	Tidak Ada

	Lainnya	dipelihara (Unit)									
4.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	0,10	0,028	28,00	2.449.531.800	1.426.153. 624	58,22	1.023.378.176		
		Persentase Sampel Pangan Asal Hewan/ Hasil Pangan Asal Hewan (%)	65,04	60,97	93,74						
4.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sampel Pangan Asal Hewan/ Hasil Pangan Asal Hewan (%)	100	100	100	2.316.745.500	1.295.537. 650	55,92	1.021.207.850		
4.1. 1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah atau Kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	100	2.316.745.500	1.295.537.650	55,92	1.021.207.850	Silpa Anggaran di Kegiatan DAK Non Fisik di Keg. Perjalana n Dinas Biasa Operasio nal	

										bandiklat nasional, tidak adanya kasus penyakit Hewan Menular Strategis di beberapa Kecamatan sehingga tidak adanya pengiriman sample sehingga anggaran silpa	
4.2	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan (%)	100	100	100	132.786.300	130.615.974	98,37	2.170.326	Tidak Ada	Tidak Ada
4.2.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1	1	100	132.786.300	130.615.974	98,37	2.170.326	Tidak Ada	Tidak Ada

		(Laporan)									
5.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman (%)	0,10	0,03	30,00	219.222.700	198.763.690	90,67	20.459.010	Tidak Ada	Tidak Ada
		Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan (%)	1,8	0,06	3,33						
5.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (%)	100	24,47	24,47	219.222.700	198.763.690	90,67	20.459.010	Tidak Ada	Tidak Ada
5.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan yang dikendalikan (Ha)	113,09	50,00	44,21	65.400.200	61.693.058	94,33	3.707.142	Tidak Ada	Tidak Ada
5.1.2	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura dan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan,	2036	96,16	4,72	153.822.500	137.070.632	89,11	16.751.868	Tidak Ada	Tidak Ada

	Perkebunan	Holtikultura dan Perkebunan (Ha)									
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	0,49	0,48	97,96	253.406.800	226.476.926	89,37	26.929.874	Tidak Ada	Tidak Ada
6.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan yang dibina	100	100	100	253.406.800	226.476.926	89,37	26.929.874	Tidak Ada	Tidak Ada
6.1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5	5	100	253.406.800	226.476.926	89,37	26.929.874	Tidak Ada	Tidak Ada
JUMLAH						13.707.516.785	11.003.572.552	80,27	2.703.944.233		

Sumber :Laporan Evaluasi Renja dan LRFK Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2024



C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Renstra organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026, bila di pilih dalam program yang dilaksanakan urusan pertanian tananaman pangan dan hortikultura pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Nomenkatur Program, Indikator dan Capaian Kinerja Program yang tertuang Dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra 2021-2026) Dinas Bunnak.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan					
1	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	0,81	0,42	51,85
2	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak	1,57	1,63	100
MISI 3 : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari					
3.	Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	4	0	0
4.	Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	4	3,32	83
MISI 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tataan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis					
5.	Peningkatan Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) (Score)	88,3	81,09	91,83
		Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	B	BB	100
		Laporan Keuangan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Pada Tabel 3.3 disajikan nomenklatur program, indikator program (*outcome*) target dari tahun 2024 serta capaian program tahun 2024. angka yang ditetapkan menggunakan formulasi yang ditetapkan pada saat *Forum Discussion Group* (FGD) yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-RPJMD atau Rencana Strategis - RENSTRA tahun 2021-2026.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular bertujuan menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular hewan dan ternak. Pencegahan ini melalui Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak. Target pelayanan kesehatan hewan tahun 2024 sebanyak 32.906 Ekor dan terealisasi sebanyak 43.093 Ekor atau sebesar 131%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.3.1
Pelayanan Kesehatan Hewan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi
1	Vaksinasi Rabies (Dosis)	2.500	484
2	Vaksinasi SE (Dosis)	1.500	300
3	Vaksinasi ND (Dosis)	10.000	3.500
4	Vaksinasi Jembrana (Dosis)	1.500	400
5	Vaksinasi PMK	10.250	7.876
6	Desinfeksi	956	72
7	Pengobatan Ternak (Ekor)	6.000	30.297
8	Pemeriksaan Gangguan Reproduksi (Ekor)	100	82
9	Pengobatan Gangguan Reproduksi (Ekor)	100	82
Jumlah		32.906	43.093

Sumber : Data Dari Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2024

Perkembangan Ternak Sapi yang dikelola UPTD-BPPT Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024 berjumlah 68 ekor bertambah dari Tahun 2023 berjumlah 63 Ekor Hal ini disebabkan karena ada sapi yang beranak Data Perkembangan Ternak Sapi UPTD-BPT Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.2
Perkembangan Ternak Sapi UPTD-BPT
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

No	Uraian	Ternak			Keterangan
		Dewasa	Anak	Jumlah	
1	KT. Agro Mandiri	2	0	2	
2	KT. Makmur Jaya	2	0	2	
3	Desa Merbau	10	0	10	
4	KT. Jati Mulya I	10	0	10	
5	Parit Culum I	4	0	4	
6	UPTD BPT Mendahara Ulu	31	9	40	
Jumlah		59	9	68	

Sumber : Data dari UPTD BPT Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2024

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pembibitan Ternak (BPT) Dinas Perkebunan dan Peternakan dibentuk berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2009 yang terletak di Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara Ulu dengan luas areal yang telah dikelola sampai saat ini ± 4,7 Ha dan tahun 2017 melakukan pengembangan dengan luas Lahan 12 Ha di lokasi Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat.

Pengembangan inseminasi buatan (IB), Target Tahun 2024 sebanyak 3.945 Akseptor dan terealisasi sebanyak 2.963 Akseptor atau sebesar 75,11%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.3.3
Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Uraian	2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Dosis Inseminasi Buatan (Dosis)	3.860	3.684	3.900	3.744	3.945	2.963
2	Jumlah Peningkatan Akseptor IB (Ekor)	2.969	2.947	3.003	2.856	3.038	2.279
3	Jumlah Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil IB (Ekor)	1.200	1.455	1.200	1.663	1.200	1.302

Sumber : Data dari Bidang Budidaya dan Agribisnis Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2024

Jumlah peningkatan populasi ternak dan Produksi Daging tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.4
Peningkatan Populasi Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021 dan 2022, 2023, 2024

NO	TERNAK	2022		2023		2024	
		Target (Ekor)	Realisasi (Ekor)	Target (Ekor)	Realisasi (Ekor)	Target (Ekor)	Realisasi (Ekor)
1.	Sapi	21.865	21.829	7.049	6.891	7.150	7.227
2.	Kambing	46.135	45.514	7.010	6.809	7.115	7.414
3.	Ayam Buras	4.147.225	3.913.918	189.210	185.043	192.048	187.779
4.	Ayam Ras/Broiler	60.414	203.205	157.254	153.120	159.612	123.458
5.	Itik	50.291	57.432	15.650	14.544	15.900	12.909

*Angka Sementara. Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2024

Tabel 3.3.5
Peningkatan Produksi Daging Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022, 2023 dan 2024

NO	PRODUKSI	2022		2023		2024	
		Target (Kg)	Realisasi (Kg)	Target (Kg)	Realisasi (Kg)	Target (Kg)	Realisasi (Kg)
1.	Ruminansia	287.687	281.065	187.855	184.473	216.033	209.052,20
2.	Unggas	274.2300	268.230	274.230	267.099	294.797	292.367,02

*Angka Sementara, Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024

Tabel 3.3.6
Luas Tanaman Perkebunan Rakyat
Menurut Komoditi Unggulan

No	Komoditi	2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)*
1	Karet	7.756	6.744	6.248
2	Kelapa Sawit	33.882	38.852	41.291

No	Komoditi	2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)*
3	Kelapa Dalam	58.912	56.907	59.367
4	Lada	37	39	22
5	Kakao	441	441	302
6	Pinang	9.846	9.842	9.797
7	Kopi Liberika	3.616	3.616	3.600
	JUMLAH	114.490	116.441	120.627

Sumber : Data dari Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2024

Tabel 3.3.7
Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan

No	Komoditi	2022 (Ton)	2023 (Ton)	2024 (Ton)
1	Karet	4.503	2.515	1.583
2	Kelapa Sawit	76.378	76.378	76.398
3	Kelapa Dalam	57.295	57.288	57.426
4	Lada	9	9	8
5	Kakao	239	242	171
6	Pinang	16.136	17.919	18.448
7	Kopi Liberika	1.237	1.237	1.239

Sumber : Data dari Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2024

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada musim kemarau masih sering terjadi kebakaran lahan dan kebun yang mengakibatkan aktivitas masyarakat dan pemerintah terganggu serta mengakibatkan kerugian fisik secara signifikan. Pencegahan dan Pengendalian kebakaran lahan dan kebun rakyat sangat dibutuhkan melalui pemadaman titik api. Pada Tahun 2024 Luas kebakaran lahan dan kebun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 96 Ha, terjadi di 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Dendang, Kecamatan Berbak, Kecamatan Geragai, Kecamatan Mendahara ulu, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.8
Kejadian Kebakaran lahan dan kebun
tahun 2022,2023 dan 2024 berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)
1	Muara Sabak Timur	-	1	-
2	Muara Sabak Barat	-	6	-
3	Kuala Jambi	1	-	-

No	Kecamatan	2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)
4	Dendang	-	10	33
5	Berbak	-	14	5
6	Geragai	-	6	12
7	Mendahara	-	8	3
8	Mendahara Ulu	-	12	6
9	Nipah Panjang	-	2	15
10	Rantau Rasau	-	3	-
11	Sadu	3	20	22
Jumlah		4	82	96

Sumber : Data dari Bidang Perlindungan Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2024

3.2 Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Kurangnya Bantuan Benih/ Bibit Unggul untuk Kelompok Tani	Penambahan Bantuan Benih/ Bibit Unggul untuk Kelompok Tani
2	Kurangnya Tenaga Ahli Penilaian Usaha Perkebunan, Pengawas Peredaran Benih/ Bibit Tanaman Perkebunan dan Petugas Informasi Harga Komoditi Perkebunan di Tingkat Kecamatan	Penambahan Personil Petugas PUP, Pengawas Peredaran Benih/ Bibit dan Informasi Harga Komoditi Perkebunan
3	Masih adanya terjadi Kebakaran Kebun dan Serangan Hama Penyakit Perkebunan di Kebun Masyarakat yang mengakibatkan Kerugian Fisik Tanaman	Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan serta Sosialisasi tentang Kebakaran Lahan Kebun, dan Penanganan Hama Penyakit Perkebunan di Kebun Masyarakat
4.	Di Beberapa Wilayah, Tanaman Kelapa Dalam sangat terganggu pertumbuhannya dan juga produksi buah kelapanya	Sangat diperlukan Pengembangan Tata Air Mikro (TAM)
5.	Peningkatan Populasi Ternak dan Produksi Daging belum optimal	Penyebaran Ternak Kepada Kelompok Tani melalui APBD II, APBD I dan APBN

6.	Masih Terbatasnya Ketersediaan Bahan dan Peralatan Inseminasi Buatan (IB) selama satu tahun berjalan	Dukungan Anggaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Penyediaan Bahan Peralatan Inseminasi Buatan (IB)
7.	Masih Terbatasnya Jumlah Inseminator yang memiliki Sertifikat Kompetensi	Mengusulkan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi Inseminator ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia
8.	Masih Terbatasnya Penyediaan Lokasi Sumber Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)	Pendampingan dan Fasilitas Kelompok Tani dalam Pengembangan Sumber Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)
9.	Belum Optimalnya Fungsi Sarana dan Prasarana Pemasaran Ternak dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan	Sosialisasi dan Peningkatan Fungsi Pemasaran Ternak dan Produk Hasil Peternakan
10.	Kurangnya Perlengkapan Meubelair serta alat kerja untuk administrasi Puskesmas (Laptop, Printer, dll)	Adanya Penambahan Perlengkapan Meubelair untuk Kelengkapan Administrasi di Kantor Puskesmas
11.	Tidak Adanya Pelatihan/ Bimtek untuk Penjagal Ternak (Juru Sembelih Halal)	Perlu diadakannya Kegiatan Pelatihan/ Bimtek Juru Sembelih Halal (Juleha)
12.	Belum Adanya Produk UMKM Kab. Tanjung Jabung Timur yang berasal dari Produk Pangan Asal Hewan (PAH) dan Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH) bersertifikat Halal	Diadakannya Sosialisasi dan Pengajuan Sertifikat Halal ke Kemenag dan Anggaran Penunjang untuk Kegiatan dimaksud
13.	Belum Adanya Pelatihan/ Bimtek Asisten Pengawas Kesmavet di Lapangan	Perlu diadakan Pelatihan/ Bimtek Asisten Pengawas Kesmavet

Sumber : Data dari masing-masing Bidang Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2024



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Tahun Anggaran 2024 Dinas Perkebunan dan Peternakan Tidak ada Dana Tugas
Pembantuan dan Penugasan



BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah digunakan untuk biaya pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 yang digunakan untuk Belanja Operasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.333.166.785 telah terealisasi sebesar Rp. 10.638.677.552 atau sebesar 79,79%. Sedangkan Belanja Modal dengan Pagu Anggaran Rp. 374.350.000 telah terealisasi sebesar Rp. 364.895.000 atau sebesar 97,48%. Total Belanja Daerah Rp. 13.707.516.785 dengan Realisasi Rp. 11.003.572.552 atau sebesar 80,27% sampai dengan Bulan Desember 2024.
2. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 menjadi masukan terhadap penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

Solusi Upaya Peningkatan Kinerja untuk Perencanaan Tahun 2024, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan lebih cermat dalam memperhitungkan kondisi-kondisi teknis dan efisiensi anggaran sehingga output dan outcome dapat tercapai sebagaimana target dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Rekomendasi

Tabel 3.12
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2023	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Merekomendasikan Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk terus menggali informasi dari berbagai stake holder terkait keberlanjutan potensi komoditi yang sampai saat ini masih terus diupayakan petani, agar kedepan gairah Jual Beli dapat Kembali pulih dan dapat memenuhi Biaya Produksi dan kebutuhan hidup petani.	Berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi terkait potensi tanaman komoditi Perkebunan yakni Komoditi Pinang yang mana sampai saat ini komoditi pinang masih tetap dipertahankan walaupun harga masih dibawah harapan petani khususnya petani Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Ketersediaan Bibit Tanaman Perkebunan
2	Merekomendasikan Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pendataan Usaha Perkebunan Sawit, sebagai Langkah identifikasi kepemilikan lahan yang dikuasai Masyarakat maupun Perusahaan pada tiap Kecamatan (Desa/Kel).	Dinas Perkebunan dan Peternakan telah melaksanakan Kegiatan Pendataan Usaha Perkebunan Sawit baik milik Masyarakat atau Perusahaan/ Perorang yang tidak/ belum memiliki izin sebagaimana yang tertuang dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 dan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 105 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan STDB dan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 283 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 105 Tahun 2018 bahwasanya kebun yang lebih dari 25 Hektar harus memiliki Izin Usaha Perkebunan dan Kurang dari 25 Hektar diterbitkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Masalah yang diselesaikan dengan melakukan Kegiatan Sosialisasi tentang STDB dan juga telah melakukan Pendataan serta menerbitkan STDB
3	Merekomendasikan Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk proaktif mensosialisasikan dan memfasilitasi program-program pemerintah Provinsi dan Pusat pada Kelompok Tani, seperti	Dinas Perkebunan dan Peternakan telah melakukan Sosialisasi Kegiatan yang bersumber dari APBN, APBN dan juga Sumber dari DBH Sawit Tahun 2023-2024 dan terus berlanjut	Kegiatan Prioritas saat ini adalah Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan akan ada juga Kegiatan Pengembangan SDM dan Penyediaan

	program penyediaan Bibit Subsidy maupun Program lainnya yang belum diketahui anggota Kelompok Tani maupun masyarakat.		Sarana dan Prasarana (Sumber Dana BDPKS/BPDP)
4	Merekomendasikan Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk mengoptimalkan sosialisasi tentang pentingnya serta manfaat yang dapat diperoleh bila mengikuti program Asuransi Ternak Sapi, Dimana Premi Asuransi mendapatkan subsidi pemerintah pusat	Dinas Perkebunan dan Peternakan sudah melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang tata cara, pentingnya dan manfaat mengikuti program Asuransi Usaha Ternak/Sapi/Kerbau ke pada Kelompok- kelompok Tani potensi pengembangan ternak sapi	Memberikan Bantuan Fasilitas permasalahan proses pendaftaran dan pengajuan Klaim serta menganggarkan Bantuan Premi AUTS/melalui APBD Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2025

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2024

